GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 1/11/2004**

Subyek : **Hari : Senin**

Kata Kunci : **Halaman : 28**

Pemerintah akan Restrukturisasi Aturan Konservasi

JAKARTA (Media): Pemerintah akan melakukan restrukturisasi pengambilan kebijakan yang terkait dengan pengaturan konservasi lingkungan hidup. Hal itu diharapkan dapat mengatasi persoalan tumpang tindih peraturan, yang sering membuat inkonsistensi arah kerja bagi pelestarian lingkungan di dalam negeri.

Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan hal tersebut pada seminar bertema *Debt for nature swap dengan pihak ketiga* yang diselenggarakan Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati), di Jakarta, Jumat (29/10).

Menurutnya, tumpang tindih kebijakan membuat tidak efektifnya implementasi konservasi di tingkat lapangan. Seperti diketahui, fasilitas berupa *Debt for Nature Swap (DNS)* merupakan mekanisme konversi utang luar negeri dengan pengalihan alokasi kegiatan bagi upaya konservasi alam. Dengan demikian, arah kebijakan secara strategis untuk menjalankan kegiatan konservasi menjadi ukuran bagi keberhasilan konversi utang tersebut.

Karena itu, persoalan tumpang tindih kebijakan pelestarian alam di dalam negeri menjadi sebuah kendala dalam menerjemahkan komitmen pemerintah. "Saya sudah sampaikan ke sidang kabinet untuk mengidentifikasi letak tumpang tindih kebijakan itu, kemudian merumuskan suatu kebijakan konservasi yang bersifat efektif," katanya.

Dalam pandangan Rachmat, skema inovatif DNS dapat menjadi sumber pendanaan baru serta membuka peluang bagi perbaikan kondisi lingkungan Indonesia. Untuk itu, Rachmat mendorong agar Departemen Keuangan memuat pos *debt swap* dalam APBN mendatang. "Kita masih memerlukan koordinasi semua pihak," jelasnya.

Sumber dana alternatif melalui mekanisme DNS, ungkap Rachmat, dapat dijadikan penunjang kegiatan konservasi, yang alokasi anggaran di KLH hanya mencapai 0,04% dari total APBN 2005. "Ini memang menyedihkan, anggaran kita terlalu kecil," katanya. Skema DNS, sambungnya, menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Krisis ekologi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kehati Ismid Hadad mengatakan masih sangat diperlukan konsistensi *policy* yang kuat dari pemerintah untuk dapat menjabarkan skema DNS secara operasional. Sekurangnya, dari komitmen negara kreditor, seperti Jerman, Prancis, Swedia, dan Finlandia potensi konversi utang luar negeri sebesar Rp15 triliun.

Meski tidak terlampau besar dibanding nilai total utang domestik, sambung Ismid, alokasi anggaran itu dapat dimanfaatkan dan didayagunakan secara terfokus bagi kegiatan pelestarian lingkungan. "Jadi, semacam harapan bagi upaya penyelamatan kekayaan ekologis yang kita miliki," sebutnya.

Program DNS, sambungnya, menjadi penting karena masih diperlukan upaya rehabilitasi kondisi lingkungan di dalam negeri yang semakin rusak dalam jangka waktu dekat. "Strategi jangka panjang konservasi harus segera dirumuskan pemerintah, nah langkah alternatif seperti ini menjadi program antara yang mendukung," jelasnya.

Melalui mekanisme *debt swap* dengan pihak ketiga ini, lanjutnya, diharapkan semua *stakeholder* terkait dapat menjadi pengawas dan melakukan fungsi evaluasi terhadap program pendanaan kegiatan konservasi. "Ini adalah kegiatan multipihak yang secara tradisi sudah terbangun, karena memang memerlukan konsultasi publik," tuturnya.

Selain itu, Ismid juga menambahkan sudah semestinya pemerintah tidak terlalu mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai faktor pembangunan. "Situasi terbaru menunjukkan betapa potensi ekologi kita telah hancur dan jasa ekosistem yang selama ini menyangga masyarakat juga semakin terganggu," jelasnya.

Dengan kondisi demikian, paparnya, pemerintah perlu segera mempercepat praktik pembangunan berkelanjutan yang melihat gerak pembangunan secara terintegrasi dengan lingkup persoalan lain. "Pertumbuhan tidak dapat dilepaskan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan ekologi yang seimbang dan terpadu," ungkapnya.

Hingga kini, sebutnya, kemampuan pendanaan bagi pelestarian hutan hanya sekitar Rp1.500/hektare per tahun, dengan luas total 20 juta hektare. Nilai minimal tersebut tidak memungkinkan memperbaharui kondisi alam.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP